



MUKOMUKO

JUMAT, 13 AGUSTUS 2021

SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Enam Mobnas Hanya Diparkirkan

MUKOMUKO - Di tengah masih kekurangan mobil dinas (mobnas) jabatan, malah sebanyak enam unit mobil dinas milik Pemkab, tidak digunakan sama sekali alias nganggur. Terdiri 2 unit mobil Mitsubishi Pajero, 2 unit mobil Toyota Pajero dan 2 unit mobil Toyota Avanza.

Kabid Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Mukomuko, Eka Purwanto, M.Si mengatakan, mobil itu sebelumnya digunakan. Namun tidak digunakan lagi setelah ada mobil dinas baru sebagai pengganti. Untuk 2 Toyota Fortuner, sebelumnya merupakan mobil dinas Kajari Mukomuko dan mobil dinas Sekda Mukomuko. Sedangkan 2 unit mobil dinas Mitsubishi Pajero, digunakan wakil bupati Mukomuko dan digunakan unsur pimpinan DPRD Mukomuko.

"Dua unit lagi, mobil dinas Toyota Avanza, sebelumnya pinjam pakai pada organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Mukomuko dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mukomuko. Saat penataan aset, 2 mobil dinas ini didata dan dicek. Kemudian tidak ada lagi pengajuan peminjaman dari kedua organisasi itu," terang Eka.

Disebutnya, mobil yang seluruhnya kini parkir di gudang penyimpanan aset Pemkab di BKD Mukomuko, belum didistribusikan ke siapapun. Lantaran pihaknya belum mendapatkan petunjuk dari bupati maupun dari Sekda Mukomuko selaku penanggungjawab aset daerah.

"Dari 6 unit mobnas, belum ada petunjuk pemanfaatannya. Kita pastikan mobil sebenarnya masih layak operasi," kata Eka.

Ia tidak menampik, ada satu unit mobil dinas, yakni Mitsubhisi Pajero, dalam kondisi rusak. Namun untuk 5 unit lainnya masih sangat layak operasi. Dan siap untuk digunakan kapanpun dibutuhkan.

"Lima unit mobil dinas itu kondisinya sangat bagus dan layak operasi. Kami hanya tinggal menunggu petunjuk pemanfaatannya saja," jelas Eka.

Eka menambahkan jika memang ada OPD atau lembaga lain yang ingin mengajukan pinjam pakai terhadap sejumlah kendaraan tersebut, dipersilakan. Pihaknya siap untuk memproses, dengan ketentuan, mendapatkan persetujuan dari pimpinan.

Oleh sebab itu, pihaknya tidak bisa memastikan apakah usulan pinjam pakai diakomodir atau tidak. sebab yang memiliki kewenangan terhadap itu Bupati atau Sekda selaku penanggungjawab aset milik daerah.

"Kami ini hanya bisa memproses dan menindaklanjuti permohonan itu untuk disampaikan kepada pimpinan. Jika pimpinan setuju, mobil dinas yang berstatus nganggur itu akan kita berikan. Sebaliknya, kalau pimpinan tidak setuju, maka kami tidak memiliki hak untuk memberikan mobil dinas itu untuk digunakan," ungkapnya. (hue)